



PERAN UMKM DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL DI KOTA KUPANG

Sonya Agustina Amaya Laho'an

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Frescilia Oceansiani Polin

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Eufracia Placida Manek

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Enike Tje Yustin Dima

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Alamat: Jalan Jend Achmad Yani No.50-52, Merdeka, Lama City, Kupang City, East Nusa Tenggara 85211, Indonesia

Korespondensi penulis: c1lllapolin722@gmail.com

Abstrak. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in regional economies by creating employment opportunities, increasing community income, and driving local economic growth. This study aims to analyze the role of MSMEs in promoting economic growth in Kupang City, East Nusa Tenggara. The research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through various literature sources including scientific journals, government reports, and previous research findings. The results indicate that MSMEs in Kupang City have made significant contributions to local economic growth through enhanced productivity, job creation, and optimization of local resource potential. However, challenges faced by MSMEs such as limited access to capital, administrative constraints, lack of human resources, and accessibility issues remain obstacles that need to be addressed collaboratively by the government, business actors, and financial institutions. Therefore, sustainable policy support and capacity building for MSME actors are key to strengthening the role of MSMEs as drivers of the local economy in Kupang City.*

Keywords: *MSMEs, Local Economy, Kupang City, Employment, Economic Empowerment*

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai suatu peran strategis dalam perekonomian daerah dalam menciptakan suatu lapangan kerja, meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Kota Kupang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja, dan optimalisasi potensi sumber daya lokal. Namun, tantangan yang dihadapi UMKM seperti keterbatasan akses permodalan, keterbatasan administrasi, kurangnya sumber daya manusia dan aksebilitas masih menjadi hambatan yang perlu ditangani secara kolaboratif oleh pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, dukungan kebijakan yang berkelanjutan dan pemberdayaan kapasitas pelaku UMKM menjadi kunci dalam memperkuat peran UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal di Kota Kupang.

Kata Kunci: *UMKM, Ekonomi Lokal, Kota Kupang, Lapangan Kerja, Pemberdayaan Ekonomi.*

PENDAHULUAN

UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yang memainkan peranan yang signifikan dalam ekonomi suatu negara terutama dalam ekonomi di Indonesia. Usaha ini memberikan andil yang besar dalam pertumbuhan nilai Produk Domestik Bruto nasional (PDB) serta menciptakan banyak peluang kerja di negara ini sebagai salah satu pilar utama dalam perkembangan ekonomi. Berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi sekitar 97% terhadap keseluruhan pekerjaan di Indonesia dan lebih dari 60% terhadap PDB negara (Rio Ferdinan Suryadi, 2024). Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sektor yang tumbuh pesat dan signifikan di Indonesia. Sektor UMKM menjadi salah satu dasar perekonomian yang mendukung aktivitas ekonomi di Indonesia (Betlehn & Samosir, 2018). UMKM mempunyai peranan dalam ekonomi lokal karena berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan di berbagai sektor. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah lama berfungsi sebagai fondasi ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. UMKM memainkan peranan vital dalam membuka kesempatan kerja, mendukung pembangunan ekonomi, dan menaikkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, memperkuat sektor UMKM diyakini mampu membawa manfaat besar bagi kesejahteraan bersama. (Satriaji Vinatra, 2023).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diakui sebagai entitas bisnis yang memiliki peran penting dalam membuka peluang kerja, meningkatkan kompetisi daya saing, dan mendorong perkembangan ekonomi. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk dalam kategori sektor informal yang mampu menyediakan sumber pendapatan bagi individu yang belum dapat menjangkau pasar formal. Biasanya, usaha ini dijalankan dengan modal kecil dan tenaga kerja yang terbatas. Oleh karena itu, mereka sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usaha serta memperluas penetrasi pasar. Meskipun demikian, Kelebihan utama UMKM terletak pada kemampuan beradaptasi dan inovasi, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di pasar (Zahra Firdausya et al., 2023). UMKM di Kota Kupang telah sukses menjadi fondasi utama dalam meningkatkan ekonomi di daerah tersebut. UMKM di Kota Kupang memiliki kontribusi penting untuk ekonomi setempat. Dengan banyaknya produk unggulan dan bantuan dari pemerintah serta institusi keuangan, UMKM di Kupang memperlihatkan kemajuan yang positif. Tidak hanya dukungan dari Pemerintah, namun juga keterlibatan masyarakat dapat menciptakan peluang baru bagi orang-orang yang berminat untuk berwirausaha, baik itu bisnis kecil maupun menengah (Husada Putra, 2016). UMKM di Kupang memproduksi berbagai macam barang yang menunjukkan kekayaan budaya dan sumber daya alam di daerah tersebut. Barang-barang ini mencakup kerajinan tangan, tenun ikat, makanan olahan dan masih banyak lainnya. Kondisi keseluruhan UMKM di Kota Kupang cukup aktif dengan potensi yang besar namun juga menghadapi berbagai tantangan. Pada tahun 2024, terdaftar sebanyak 17.609 unit UMKM di Kota Kupang. Meskipun angka tersebut cukup besar, UMKM di Kupang masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan daya saing dan kinerja mereka. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan UMKM di Kota Kupang meliputi keterbatasan akses permodalan, pemasaran, serta kualitas sumber daya manusia yang belum optimal. UMKM seringkali menghadapi kendala seperti kekurangan modal, baik dalam jumlah dan sumber daya yang ada, keterbatasan dalam kemampuan manajerial, serta kurangnya keterampilan di bidang operasional dan pemasaran. Ini merupakan tantangan mendasar yang dihadapi oleh hampir semua UMKM dalam memulai dan

mengembangkan usaha mereka (Suci et al., 2017). Walaupun masih terdapat beberapa kendala, prospek UMKM di Kota Kupang terlihat positif berkat berbagai upaya yang terus dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk mengulas secara menyeluruh bagaimana UMKM berkontribusi dalam pengembangan ekonomi di Kota Kupang. Data diperoleh melalui kajian literatur yang melibatkan jurnal ilmiah, laporan pemerintah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan. Pendekatan ini dipilih agar dapat memberikan pemahaman menyeluruh terhadap kontribusi dan tantangan yang dihadapi UMKM dalam konteks ekonomi lokal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kontribusi UMKM Terhadap Ekonomi Lokal

UMKM memberikan dampak yang sangat penting dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah. Dari penciptaan kesempatan kerja hingga pemberdayaan komunitas lokal melalui produk dan inovasi, UMKM tidak hanya memengaruhi perekonomian secara langsung, tetapi juga berperan dalam membangun ketahanan ekonomi di tingkat lokal. Namun, untuk meningkatkan kontribusi UMKM, diperlukan perhatian serta kebijakan yang mendalam untuk menangani berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor ini. Salah satu poin utama yang perlu dibahas adalah kemampuan UMKM dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Seperti yang terungkap dalam hasil studi, UMKM di Indonesia menyerap sebagian besar angkatan kerja di sektor non-pertanian. Ini menunjukkan bahwa meskipun UMKM lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar, mereka memiliki kemampuan yang signifikan dalam menyerap tenaga kerja lokal. Hal ini jelas memberikan dampak positif terhadap penurunan angka pengangguran dan menawarkan peluang kerja yang lebih merata, khususnya di daerah yang kurang terjangkau oleh industri besar. Oleh karena itu, sektor UMKM memiliki potensi untuk mempercepat pemerataan ekonomi di berbagai kawasan. Namun, meskipun mampu menyerap banyak tenaga kerja, UMKM sering kali terhambat oleh masalah pendanaan. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan, baik dari bank maupun investasi swasta. Keterbatasan akses modal ini menjadi penghalang utama bagi banyak UMKM dalam memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan melakukan inovasi. Karena itu, sangat krusial bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk merumuskan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan, seperti penyediaan dana kredit mikro atau skema pembiayaan yang lebih fleksibel bagi UMKM (Nst, 2024).

Hambatan dan Tantangan

Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM yang menghambat dan menghalangi pertumbuhan dan perkembangan yaitu :

a) Keterbatasan Modal

UMKM sering menghadapi tantangan dan masalah dalam menjual produk mereka dengan baik akibat keterbatasan dan kekurangan dana. Hal ini terjadi karena banyak UMKM merupakan usaha individu yang hanya bergantung pada dana pribadi. Di samping itu, mereka juga menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan maupun institusi keuangan lainnya kerap terkendala akibat ketentuan yang cukup memberatkan.. Dana usaha merupakan elemen penting dalam memulai bisnis. Modal yang cukup memungkinkan pelaku

UMKM untuk memperluas usaha mereka, tanpa dana yang memadai, UMKM sering kali sulit untuk mempertahankan kelangsungan usaha mereka, terutama berkembang di pasar yang luas. Ketersediaan dana dalam pembiayaan usaha juga kemampuan UMKM dalam berinovasi dan meningkatkan mutu produk (Mone et al., 2024). UMKM cenderung mudah beralih usaha karena keterbatasan modal. Dengan modal yang terbatas, UMKM mungkin kesulitan untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan dan akhirnya memilih untuk berpindah ke jenis usaha lain yang dianggap lebih menjanjikan (Bambang Agus Windusancono, 2021).

b) Akseibilitas

Bisnis berskala kecil dan menengah sering kali kesulitan mendapatkan dukungan dana serta layanan perbankan lainnya dengan bunga dan syarat yang wajar. Kemudahan akses keuangan dari kedua sumber, baik resmi maupun tidak resmi, dapat mengatasi masalah terkait kredit yang diperlukan untuk investasi awal maupun pertumbuhan usaha. Keterbatasan akses bagi usaha kecil dan mikro terhadap kredit perbankan membuat banyak pengusaha menghadapi kesulitan (Asyifah Fauzah Delfira et al., 2025).

c) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kemajuan suatu organisasi sangat bergantung pada kualitas dan kapabilitas sumber daya manusianya, karena SDM merupakan aset terpenting dalam organisasi, baik besar maupun kecil (Malikhah et al., 2024). Banyak pengusaha UMKM yang masih menjalankan bisnis mereka secara konvensional dengan pemahaman dan keterampilan yang minim, khususnya dalam bidang inovasi, analisis pasar, dan penerapan teknologi. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya akses ke pelatihan profesional turut menghalangi kemajuan UMKM. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam manajemen keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta penerapan standar kualitas produk yang memadai. Keterbatasan ini juga mempengaruhi kemampuan UMKM untuk menarik dan mempertahankan pekerja yang berkualitas, serta bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar (Asyifah Fauzah Delfira et al., 2025).

d) Keterbatasan Teknologi

Keterbatasan teknologi dapat membuat suatu efisiensi dalam proses produksi menjadi rendah. Kendala teknologi muncul akibat berbagai aspek, seperti kurangnya dana untuk investasi dalam pengadaan peralatan baru, kurangnya pengetahuan tentang kemajuan teknologi, dan minimnya tenaga kerja yang mampu mengoperasikan peralatan baru (Fujianti et al., 2019).

Peran pemerintah

Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan ekonomi supaya stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terpenuhi, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan bisa dikurangi (Masrurroh et al., 2021). Untuk memperkuat daya saing UMKM di Indonesia, pihak pemerintah serta lembaga yang bersangkutan sebaiknya berkonsentrasi pada pengembangan infrastruktur bisnis, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan aksesibilitas modal. Selain itu, pemerintah juga perlu adanya peningkatan cakupan bantuan bagi UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan kemampuan SDM (Aini et al., 2024). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan atau pemberdayaan UMKM sangat penting dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Menurut (Mone et al., 2024) dalam penelitiannya mengenai kontribusi dan peran pemerintah daerah terhadap UMKM di kota kupang yaitu;

1. Pemberian Fasilitas

Pemerintah setempat menyediakan berbagai jenis fasilitas yang diperlukan oleh UMKM. Ini termasuk dukungan modal, akses ke lokasi usaha yang strategis, penyediaan gedung atau ruang

usaha, serta penyediaan alat atau mesin yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional. Pemerintah, sebagai fasilitator, berperan penting dalam mendukung dan mempermudah pencapaian tujuan pengembangan usaha bagi UMKM (Anggraeni et al., 2021). Tujuannya adalah untuk meringankan beban biaya awal dan operasional UMKM, serta memudahkan mereka dalam menjalankan aktivitas bisnis. Contoh upaya konkret di Kota Kupang adalah program distribusi peralatan tenun dan benang untuk UMKM Tenun Ikat yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan mutu sumber daya manusia di UMKM. Pelatihan ini meliputi berbagai topik, seperti manajemen bisnis, keuangan, pemasaran, produksi, dan pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi itu seperti media sosial. Media sosial telah membawa perubahan signifikan bagi komunitas bisnis di Indonesia, terutama bagi pelaku UMKM, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam pengelolaan usaha (Joshua, 2017). Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan pelaku UMKM mampu mengatur bisnis mereka dengan lebih efisien, meningkatkan mutu produk, serta merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Menyelenggarakan suatu pelatihan juga dapat mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan UKM di bidang riset pasar, pengembangan produk, serta strategi pemasaran (Pardede et al., 2022).

3. Bantuan Promosi dan Pemasaran

Bank Indonesia memfasilitasi pemasaran produk UMKM melalui keikutsertaan dalam pameran dan pemanfaatan platform digital untuk promosi. BI mendukung UMKM dalam memperbesar jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan melalui berbagai kegiatan promosi pemasaran, baik secara langsung maupun online (Laurensia Murin Boro et al., 2024). Pemerintah daerah juga memberikan dukungan terkait promosi dan pemasaran produk dari UMKM. Bentuk bantuan ini bisa berupa fasilitasi untuk mengikuti pameran dagang, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta membantu pemasaran produk dengan memanfaatkan sarana digital baik dalam e-commerce atau media sosial. Selain itu, pemerintah daerah juga bisa membantu membangun jaringan bisnis antar UMKM, sehingga mereka dapat saling mendukung dan memperluas jangkauan pasar.

4. Regulator

Sebagai regulator, pemerintah bertugas menciptakan kebijakan yang memudahkan pengembangan UMKM dan menjaga iklim usaha tetap kondusif. Pemerintah berperan dalam membuat aturan-aturan yang mendukung pertumbuhan UMKM dan memastikan kondisi lingkungan usaha tetap stabil sehingga UMKM dapat berkembang (Anam, 2019). Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kupang berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hingga saat ini, dinas tersebut belum menyusun kebijakan secara mandiri. Sebaliknya, seluruh langkah yang diambil merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan ini menjadi acuan penting bagi dinas dalam memastikan pelaksanaan tugas yang selaras dengan upaya mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Kupang.

5. Katalisator

Dalam rangka menjalankan perannya sebagai pendorong utama, pemerintah bertindak sebagai katalisator dalam mempercepat pertumbuhan UMKM. Sehingga, pelaku usaha mikro,

kecil, dan menengah diharapkan oleh pemerintah dapat memiliki semangat kewirausahaan dan mengubah usaha mereka menjadi lebih maju. Dengan demikian, peran pemerintah sebagai pendorong diharapkan untuk ikut serta dalam proses tersebut, bukan hanya terlibat dalam keseluruhan aktivitas UMKM (Zaelani et al., 2022). Pemerintah berfungsi sebagai penggerak untuk mempercepat kemajuan UMKM. Tugas ini tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, melainkan lebih berfungsi sebagai pendukung supaya prosesnya dapat berlangsung lebih cepat. Pemerintah memiliki kemampuan untuk berbagai upaya, seperti memberikan apresiasi dukungan kepada UMKM dan memberdayakan komunitas kreatif agar lebih inovatif daripada yang hanya berorientasi pada konsumsi, memberikan sumber pembiayaan, serta menyediakan dukungan pengetahuan bagi UMKM.

KESIMPULAN

UMKM di Kota Kupang memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah. Keberadaan lebih dari 17.000 unit UMKM membuktikan bahwa sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah, terutama dalam aspek peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pengembangan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kontribusi UMKM sangat nyata dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan akses ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat, khususnya di sektor-sektor non-formal yang belum banyak dijangkau oleh industri besar. Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, seperti keterbatasan modal, akses terhadap teknologi, pemasaran, serta rendahnya kapasitas manajerial dan keterampilan pelaku usaha. Permasalahan-permasalahan ini menghambat produktivitas serta daya saing UMKM di pasar yang semakin sengit, terutama di era digital.

Peran pemerintah daerah sangat diperlukan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam mendorong pemberdayaan UMKM secara lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui berbagai program seperti bantuan peralatan produksi, pelatihan keterampilan, fasilitasi pemasaran, hingga implementasi regulasi yang berpihak kepada UMKM, pemerintah dapat menciptakan ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat diperlukan dibutuhkan agar UMKM dapat berkembang secara optimal. Diperlukan pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan dalam pengembangan UMKM, agar mereka benar-benar mampu menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi lokal di Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N., Safitri, E. N., Majalina, G., Abidin, M. Z., & Khoiriawati, N. (2024). Analisis Peluang Dan Tantangan Teknologi Terhadap Pemberdayaan Umkm Di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), 2564–2571. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i5.2842>
- Anam, K. (2019). Government Strategy In The Development Of Msme In Jepara District. *Journal of Political and Government Studies*, 8(3), 211–220.
- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., Alimah, M., & Malang, U. M. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47–65.

- Asyifah Fauzah Delfira, Putri Yuliarman, Muhammad Baihaqi, & Muhammad Baihaqi. (2025). Analisis Permasalahan Perkembangan UMKM Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 167–180. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3184>
- Bambang Agus Windusancono. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Indonesia. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(2), 25–38. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.577>
- Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080>
- Fujianti, L., Wulandjani, H., & Susilawati. (2019). Peningkatan Keterampilan Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi Bagi UMKM Batik Cirebon. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 1(1), 21–27. <https://doi.org/10.35814/suluh.v1i1.947>
- Husada Putra, A. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi Oktober*, 5(2), 40–52.
- Joshua, B. (2017). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 8(2), 111.
- Laurensia Murin Boro, Pius Bumi Kellen, & Fransina W.Ballo. (2024). Peran Bank Indonesia Terhadap Binaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Kupang. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 323–332. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5741>
- Malikhah, I., Nst, A. P., Sari, Y., Sain, F. S., Pembangunan, U., & Budi, P. (2024). Implementasi Kompetensi SDM Terhadap Kinerja UMKM. *MANEGGGIO : Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 7(2), 225–235.
- Masruroh, I., Andrean, R., & Arifah, F. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Bagi Umkm Di Indonesia. *Journal of Innovation and Knowledge*, 1(1), 41–48. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/38>
- Mone, I. M., Tamen, N., & Tiwu, M. I. H. (2024). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan UMKM Tenun Ikat di Kota Kupang (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kupang). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 6791–6801.
- Nst, Y. A. (2024). Peran UMKM Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal. *Jurnal Bangun Manajemen*, 3(2), 219–224. <https://doi.org/10.56854/jbm.v3i2.487>
- Pardede, S. J., Saputro, G. E., Iswati, S., & Suwito. (2022). Strategi Pemberdayaan Umkm Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Guna Kemandirian Ekonomi Bangsa Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490.
- Rio Ferdinan Suryadi. (2024). Peran Umkm Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal Studi Kasus Di Indonesia. *Journal Central Publisher*, 1(9), 1096–1101. <https://doi.org/10.60145/jcp.v1i9.207>
- Satriaji Vinatra. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3),

01–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i3.832>

Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6(1), 51–58.

Zaelani, R., Sujana, H., & Zaky, M. (2022). Optimalisasi Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator; Katalisator; Regulator Dan Pemahaman Keuangan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Sukabumi Kota. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 957–972. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2436>

Zahra Firdausya, L., Perwira Ompusunggu, D., & kunci, K. (2023). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Digital Abad 21 Micro, Small and Medium Enterprises (Msme) the Digital Age of the 21 St Century. *Talijagad*, 2023(3), 14–18. <https://journal.unusida.ac.id/index.php/tali-jagad/index%7Ce>